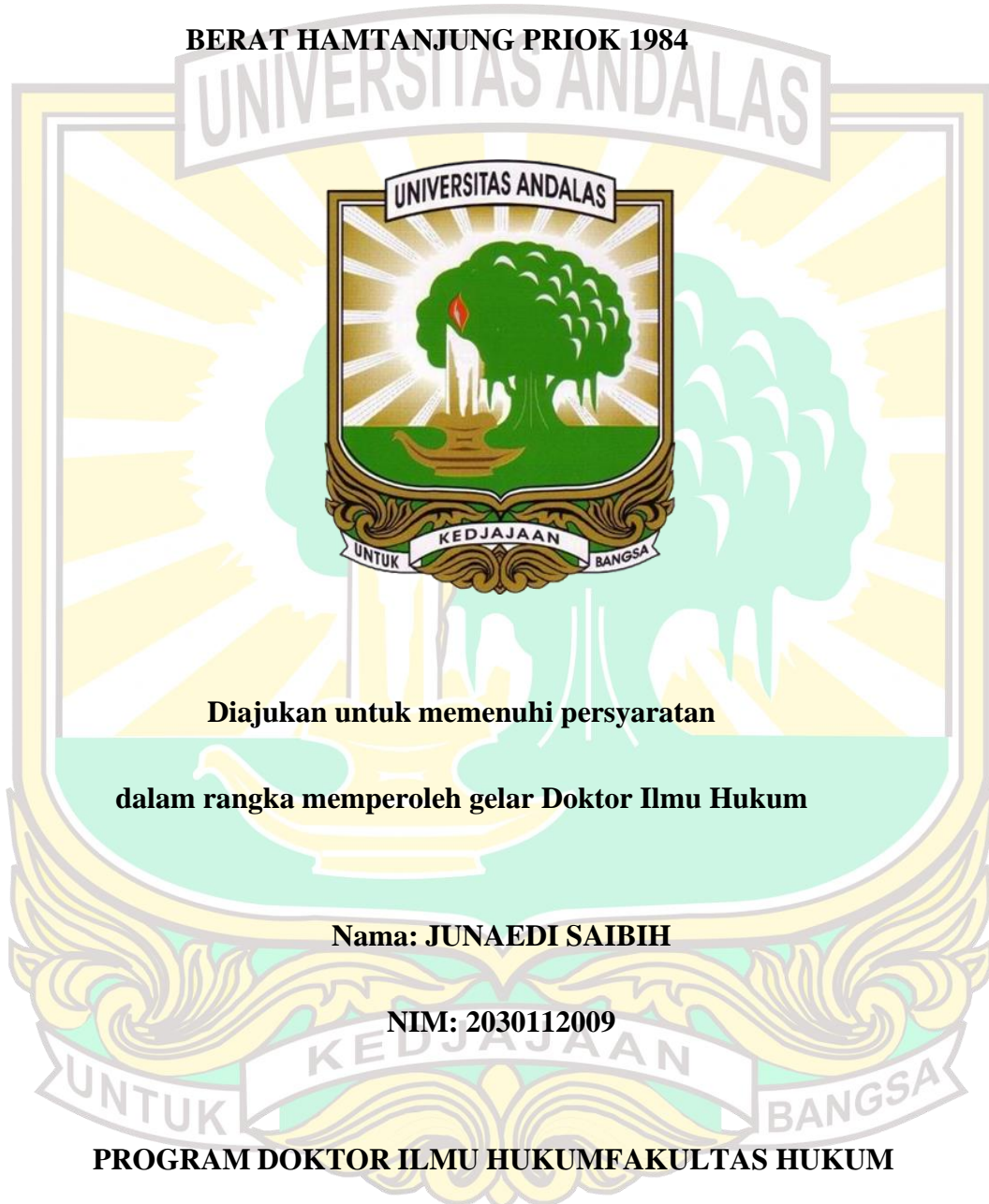


DISERTASI

**Keadilan Transisional yang Berpusat pada
Korban dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran**

Berat Hamtanjung Priok 1984



Diajukan untuk memenuhi persyaratan

dalam rangka memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum

Nama: JUNAEDI SAIBIH

NIM: 2030112009

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2023

ABSTRAK

Keadilan Transisional Yang Berpusat Pada Korban Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tanjung Priok 1984

Junaedi Saibih, 2030112009, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Disertasi ini mengkaji peristiwa Tanjung Priok 1984 yang menewaskan banyak pengunjuk rasa. Masih terdapat pertanyaan selama lebih dari 30 tahun mengenai jumlah sebenarnya korban yang terbunuh atau yang hilang, karena keluarga korban terlalu takut untuk berbicara tentang orang yang mereka cintai. Isu yang menjadi protes para korban adalah tuntutan pembebasan pemimpin komunitas Muslim. Kekejaman yang terjadi di Tanjung Priok adalah akibat dari protes masyarakat atas penodaan tempat suci umat Islam di masyarakat yang disebut Musala oleh seorang perwira militer, dan berita penodaan ini dengan cepat menyebar ke daerah padat penduduk di Tanjung Priok. Disertasi ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian tentang konsep islah dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM Kasus Tanjung Priok berdasarkan teori keadilan dan penggunaan islah dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat berdasarkan perspektif hukum korban. Dengan mengadopsi pendekatan *narrative theory* untuk disertasi ini, memungkinkan identifikasi relasi antara sistem dan struktur sosial untuk menjawab akar penyebab pelanggaran hak asasi manusia, pula tanpa mengabaikan cara kerja sistem dan bentuk struktur sosial yang ada di Indonesia. Studi ini mengkaji keadilan berbasis korban setelah menganalisis respon keadilan transisional yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan oleh pelaku untuk menyelesaikan peristiwa Tanjung Priok. Pengadilan HAM sebagai salah satu kebijakan peradilan transisional untuk menyelesaikan kekejaman di Tanjung Priok telah membebaskan semua tergugat. Apalagi, UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya telah diupayakan beberapa inisiatif rekonsiliasi antara pelaku dan korban (keluarga). Salah satu inisiatifnya adalah dengan perjanjian rekonsiliasi tradisional Islam (Piagam *Islah*). Dipengaruhi oleh Hukum Islam, upaya ini melalui cara-cara Islam tradisional untuk mencapai rekonsiliasi antara para pihak korban kekejaman peristiwa Tanjung Priok yang adalah umat Muslim. Analisis Piagam *Islah* dalam konteks peristiwa Tanjung Priok 1984 sebagai studi kasus merupakan cara untuk memberikan kontribusi studi pembangunan perdamaian berbasis korban dalam kerangka keadilan transisional dan inisiatif apa pun yang dapat mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Pendekatan ini mengarah pada terobosan semua pihak yang mengakui bahwa prioritasnya adalah persaudaraan antar seluruh umat Muslim. Harapannya, Piagam *Islah* juga mengupayakan kerukunan dan penyelesaian masalah sebelum para pihak maju ke pengadilan

Kata kunci: *Islah*, keadilan transisional, Tanjung Priok, pengadilan HAM.

ABSTRACT

Victim's Centred Transitional Justice in the Settlement of Severe Violation of Human Rights on The Incident of Tanjung Priok 1984
Junaedi Saibih, 2030112009, 218, Doctoral Program of Faculty of Law,
Andalas University

This PhD thesis examines the Tanjung Priok's incident in 1984, which killed many protestors. A question still remains over 30 years on, over the actual number of victims killed or who disappeared as the victim's families are too frightened to speak about their loved ones. The issue over which the victims were protesting was the liberation for their community's Moslem leader. The Tanjung Priok atrocities were the result of people protesting over the desecration of the Moslem holy place in the community called *Musala* by a military officer and news of this offense traveled quickly through the densely populated area of Tanjung Priok. By adopting the narrative theoretical approach for this thesis, I argue that it allows for the unspoken questions from victims and victims' families to be raised after the reformation. Moreover, it allows the identification of the relationships between systems and social structures to answer the root causes of human rights abuses, also cannot ignore the workings of the system and the forms of the social structures that exist in Indonesia. This study examines the victim-based justice after analysing transitional justice responses implemented by the Indonesian government and by perpetrators to settle the Tanjung Priok's incident. The Human Rights Court as one of the transitional justice policies to settle the Tanjung Priok's atrocities has acquitted all the defendants. Moreover, the Truth and Reconciliation Law was dismissed by the Constitutional Court. Prior to this outcome, several initiatives for reconciliations between the perpetrators and victims (families) were attempted. One of the initiatives was the traditional Islam reconciliation agreement (*Islah Charter*). Influenced by Islamic Law it attempts through traditional Islamic means to reach reconciliation between the parties since the victims of the Tanjung Priok atrocities were Moslem. Analysis of the *Islah Charter* in the context of the 1984 Tanjung Priok incident as a case study, is a way to contribute victim-based peacebuilding studies in a transitional justice framework and any initiatives that may prevent similar abuses in the future. This approach leads to a breakthrough of all parties recognising the priority was to the brotherhood of all Muslims. Desirably, the *Islah Charter* also seeks for the harmony and settling issues before the parties go to a court of law.

Keywords: *Islah*, transitional justice, human rights court, Tanjung Priok